

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 pasal 1 butir 23 pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, menyatakan pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Menurut keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No KEP.10/MEN/2004 tentang pelabuhan perikanan pada ketentuan umum pasal 1, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-

batas tertentu sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan pantai adalah unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang prasarana pelabuhan perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan dipimpin oleh seorang kepala.

2.2 Peran dan Fungsi Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 pasal 41A tentang Perikanan, fungsi dan peran pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan hasil tangkapan. Setelah ikan hasil tangkapan tersebut ditangani dengan baik, maka ikan hasil tangkapan tersebut dapat dipasarkan atau didistribusikan. Salah satu upaya pengoperasional pelabuhan perikanan adalah mengembangkan pelabuhan perikanan sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan (*central market*), ditempat inilah terjadi pertemuan dan transaksi antara produsen/nelayan dengan konsumen/pedagang. Oleh karena itu, dalam suatu kompleks pelabuhan perikanan, fasilitas utama selain bangunan laut juga dilengkapi dengan bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Sedangkan menurut pendapat Lubis (2000), peran pelabuhan perikanan meliputi beberapa aktivitas antara lain:

1. Sebagai pusat untuk aktivitas produksi yaitu:

- Tempat mendaratkan ikan hasil tangkapan
- Tempat untuk mempersiapkan operasi penangkapan ikan (mempersiapkan alat-alat tangkap, bahan bakar, perbaikan kapal)

2. Sebagai pusat distribusi yaitu:

- Tempat transaksi jual beli ikan
- Terminal untuk mendistribusikan ikan

3. Sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan yaitu:

- Pusat kehidupan masyarakat nelayan
- Pusat pembangunan ekonomi masyarakat nelayan
- Pusat lalu lintas dan jaringan informasi antar nelayan maupun dengan masyarakat luar

Menurut Lasse (2014), fungsi pelabuhan antara lain:

1. *Gateway*

Pelabuhan berfungsi sebagai pintu yang dilalui orang dan barang kedalam pelabuhan yang bersangkutan. Disebut sebagai pintu karena pelabuhan adalah jalan atau area resmi bagi lalu lintas barang perdagangan.

2. *Link*

Pelabuhan sebagai mata rantai (*link*) yang menjadi penghubung rangkaian transportasi. Pada fungsinya sebagai *link* ini terdapat tiga unsur penting yakni: (a) menyalurkan atau memindahkan barang muatan dari kapal ke truk; (b) operasi pemindahan berlangsung cepat; (c) efisien dalam arti biaya.

3. *Industrial Entity*

Pelabuhan yang diselenggarakan secara baik akan bertumbuh dan akan mengembangkan bidang usaha lain sehingga area pelabuhan menjadi zona industri terkait dengan kepelabuhan.

Menurut Murdianto (2004), dari peran dan fungsi pelabuhan perikanan memiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi umum

- Jalan keluar masuk pendaratan ikan
- Sebagai dermaga tempat sandar kapal
- Menyediakan kolam air yang terlindungi dari gelombang
- Menyediakan pelayanan navigasi, penahan gelombang, perkantoran, halaman parkir, toilet umum dan fasilitas lainnya

2. Fungsi khusus

- Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan
- Tempat pelelangan ikan
- Tempat memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan
- Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
- Tempat pengembangan masyarakat nelayan
- Pusat pembinaan mutu hasil perikanan
- Fasilitas pabrik es
- Fasilitas penyediaan dan perawatan sarana produksi perikanan

Peran pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat kedalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi.

2.3 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan No: KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas pelabuhan perikanan, dimana fasilitas pelabuhan perikanan tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu: fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan/penunjang.

❖ Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayaran, selain itu termasuk juga tempat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat kapal. Fasilitas pokok pelabuhan perikanan terdiri dari:

1. Fasilitas pelindung, meliputi: pemecah gelombang (*break water*), penangkap pasir (*grond grains*), turap penahan tanah (*revetment*)
2. Fasilitas tambat, meliputi: dermaga, *jetty*, tiang tambat (*bolder*), pelampung tambat, *bollard*, serta *bier*
3. Fasilitas perairan, meliputi: alur dan kolam pelabuhan
4. Fasilitas penghubung, meliputi: jembatan, jalan kompleks, drainase, gorong-gorong
5. Fasilitas Lahan seperti lahan Pelabuhan Perikanan

❖ Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pelabuhan perikanan dan atau yang dapat diusahakan oleh perorangan atau badan hukum. Adapun fasilitas fungsional yang dimaksud antara lain:

1. Fasilitas pemasaran hasil perikanan seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar ikan
2. Fasilitas navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, rambu-rambu, lampu suar dan menara pengawas
3. Fasilitas suplai air bersih, es, listrik dan bahan bakar
4. Fasilitas pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti *dock/slipway*, bengkel dan tempat perbaikan jaring

5. Fasilitas penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti *transit sheed* dan laboratorium pembinaan mutu
 6. Fasilitas perkantoran seperti Kantor Administrasi Pelabuhan dan kantor swasta lainnya
 7. Fasilitas transportasi seperti alat-alat angkut ikan dan es
 8. Fasilitas pengolahan limbah seperti IPAL
- ❖ Fasilitas Tambahan Pelabuhan Perikanan

Fasilitas tambahan atau penunjang pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan atau memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Fasilitas tambahan tersebut terdiri dari:

1. Fasilitas pembinaan nelayan seperti Balai Pertemuan Nelayan
2. Fasilitas Pengelola Pelabuhan seperti Mess Operator, Pos Jaga dan Pos Pelayanan Terpadu
3. Fasilitas sosial dan umum seperti tempat penginapan nelayan, tempat peribadatan, MCK, *Guest House* dan Kios
4. Fasilitas IPTEK

2.4 Pengertian Manajemen, Fungsi Manajemen dan Manajemen Pelabuhan

Menurut Handoko (2009), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Stephen (2004), manajemen sebagai proses mengkoordinasi kegiatan-kegiatan pekerjaan secara efisien dengan dan melalui orang lain, proses

menggambarkan fungsi-fungsi yang sedang berjalan atau kegiatan utama yang dilakukan oleh para manajer. Fungsi-fungsi itu lazimnya disebut merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan. Peran manajemen mengacu kepada kategori-kategori tertentu manajerial yang berkaitan dengan hubungan antar pribadi berkaitan dengan informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan.

Menurut Torang (2013), terdapat empat fungsi dasar manajemen yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Fungsi tersebut dilakukan dalam proses manajemen. Oleh sebab itu, agar manajemen pada organisasi dengan mudah mencapai tujuannya secara efektif, efisien dan rasional maka seorang pimpinan organisasi harus mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen.

Menurut Lasse (2014), bentuk dasar pengelolaan pelabuhan yakni:

a. *Landlord Port*

Pengertian *The landlord port* adalah pelabuhan yang berada di bawah penguasaan otoritas pelabuhan. Pihak otoritas pelabuhan hanya menyediakan prasarana pokok berupa tanah daratan dan perairan termasuk *waterfront*.

b. *Tool Port*

Pengertian *The tool port* adalah pelabuhan yang berada di bawah penguasaan otoritas pelabuhan. Pihak otoritas pelabuhan tidak hanya menyediakan prasarana pokok berupa tanah daratan dan perairan, tetapi juga membangun fasilitas pergudangan dan pengadaan peralatan bongkar muat.

c. *Operating Port*

Pelabuhan *The operating port* adalah pelabuhan yang berada di bawah penguasaan otoritas pelabuhan. Pihak otoritas pelabuhan menyediakan prasarana pokok berupa daratan dan perairan, membangun sarana pergudangan, pengadaan

alat bongkar muat dan mengoperasikan sendiri semua fasilitas dan peralatan yang tersedia.

Pelabuhan-pelabuhan dengan bentuk manajemen *Landlord, Tool* dan *Operating Port* merupakan pelabuhan milik pemerintah yang dikelola badan usaha pemerintah/negara atau bermitra dengan swasta. Adanya pengelolaan pelabuhan yang baik dengan ketersediaan prasarana, peralatan bongkar muat kapal, peralatan apung dan rambu kenavigasian dan pelayanan teknis pelabuhan oleh pengelola pelabuhan atau *stakeholder* dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan empat fungsi manajemen sebagai acuan dalam kegiatan pengelolaan pelabuhan meliputi kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan pelayanan untuk pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan dalam rangka meningkatkan sektor kinerja Pelabuhan Perikanan dengan mudah mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

2.5 Sumberdaya Pada Kawasan Minapolitan

2.5.1 Sumberdaya Alam

Menurut Zulkifli (2008), sumberdaya alam merupakan unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya. Sumberdaya alam yaitu sumberdaya perikanan mempunyai karakteristik yang unik yaitu merupakan sumberdaya milik umum (*common property*) akibatnya pemanfaatan sumberdaya ikan bersifat *open access* artinya semua orang dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di suatu wilayah tanpa adanya pembatasan.

2.5.2 Sumberdaya Buatan

Sumberdaya buatan merupakan sumberdaya yang tidak terbentuk sendiri melainkan buatan manusia. Pada program minapolitan sumberdaya buatan adalah

pelabuhan perikanan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi: Tempat Pendaratan Ikan (TPI), akses jalan raya, ketersediaan listrik, dermaga, pabrik es, air bersih dan kapal penangkapan (Nurmalasari, 2012).

Sumberdaya buatan merupakan sumberdaya yang sengaja diciptakan oleh manusia di suatu wilayah yang bertujuan untuk menunjang segala macam aktivitas yang terdapat di wilayah tersebut. Contoh dari sumberdaya buatan adalah berupa fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, tempat ibadah, warung, perbengkelan, pasar, dan sebagainya.

2.5.3 Sumberdaya Manusia

Menurut Riniwati (2008), sumberdaya manusia memiliki definisi antara lain:

- a. Manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
- b. Potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- c. Potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan nonfisik dalam eksistensi organisasi.

Menurut Sastrohadiwiryo (2003), suatu perusahaan selalu mengupayakan hal-hal yang menyangkut pengembangan sumberdaya manusia yang dimilikinya. Sumberdaya manusia dinilai menjadi salah satu aspek vital di perusahaan karena jika sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan memiliki tingkat kinerja yang baik maka akan berpengaruh positif terhadap produktivitas perusahaan, sebaliknya jika sumberdaya manusia yang dimiliki oleh perusahaan memiliki kinerja yang buruk maka akan berpengaruh negatif terhadap produktivitas perusahaan. Oleh karena

itu, manajemen sumberdaya manusia menjadi sangat penting dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sumberdaya manusianya.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu aspek penting yang menjadi penentu suatu keberhasilan kegiatan. Manusia sebagai pengguna dan pengelola sumberdaya sebaiknya memiliki kemampuan untuk mengatur sehingga mereka dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan baik serta memperhatikan kepedulian pada keberlanjutan. Dalam hal ini, sumberdaya manusia pada kawasan minapolitan antara lain masyarakat yang terdiri dari nelayan, pedagang dan pengelola sumberdaya.

2.6 Kebijakan Pembangunan Perikanan

Sejak tahun 2000, pembangunan sektor kelautan dan perikanan mendapat perhatian yang besar dari pemerintah untuk menjadi salah satu motor penggerak pembangunan nasional. Selama kurun waktu tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pada masa tersebut dibuat suatu kebijakan yang ingin menjadikan laut sebagai primadona bangsa Indonesia ke depan dengan membuat suatu gerakan yang dinamakan Gerbang Mina Bahari (Gerakan Nasional Pembangunan Perikanan dan Kelautan). Sedangkan pada tahun 2007, pemerintah telah menempuh kebijakan revitalisasi perikanan dengan melakukan modernisasi armada perikanan rakyat melalui pengembangan kapal motor dan perbaikan teknologi alat tangkap (Supriadi dan Alimudin, 2011).

Berbagai upaya dilakukan agar Indonesia mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor

ini sebagai *prime over* pembangunan ekonomi nasional. Jika melihat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan memiliki optimisme hasil yang dapat diperoleh Negara ini dari pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di masa depan. Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi (KKP, 2010).

Minapolitan merupakan salah satu program pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah yang diperkenalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Konsep pembangunan ini sejalan dengan Arah Umum Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan Pengembangan Kawasan sebagaimana tertuang di dalam Buku I RPJM Tahun 2010-2014. Sejalan dengan itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan cara konsep minapolitan dimana salah satu tujuan konsep ini untuk mengembangkan kawasan ekonomi unggulan menjadi lebih produktif. Sebagai langkah nyata telah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 12/2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan (Sunoto, 2011).

2.7 Minapolitan

2.7.1 Pengertian Minapolitan

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010), minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem manajemen kawasan yang menganut prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi.

Menurut Sunoto (2011), *pertama*, prinsip integrasi diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan *stakeholder*, baik instansi sektoral, pemerintahan di tingkat pusat atau daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. *Kedua*, dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan pemanfaatannya diharapkan akan lebih optimal. Selain itu prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, efisiensi dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan sehingga menghasilkan produk-produk ekonomi kompetitif. *Ketiga*, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi, secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara lebih intensif. *Keempat*, prinsip percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara kompetitor, melalui peningkatan *market share* produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia.

Kawasan ekonomi unggulan pada setiap provinsi dan kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa kawasan ekonomi unggulan bernama minapolitan, sentra produksi pada setiap kawasan minapolitan terdiri atas sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan, perikanan dan kegiatan lain yang saling terkait (KKP, 2010).

2.7.2 Tujuan Minapolitan

Menurut KKP (2010), minapolitan dilaksanakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan yang adil dan merata.
3. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

2.7.3 Karakteristik Kawasan Minapolitan

Karakteristik kawasan minapolitan dalam KKP (2010), adalah:

1. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan dan atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya seperti jasa dan perdagangan.
2. Menampung dan memperkerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya.
3. Mempunyai sarana dan prasarana memadai sebagai pendukung aktivitas ekonomi.
4. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

2.7.4 Persyaratan Kawasan Minapolitan

Dalam KKP (2010), suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Komitmen daerah berupa kontribusi pembiayaan, personil dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan.
2. Memiliki komoditas unggulan dengan nilai ekonomi tinggi.
3. Letak geografis yang strategis dan memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggul.

4. Kesesuaian dengan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan.

2.8 Pendapatan Masyarakat

Masyarakat pesisir (nelayan) dapat dikelompokkan menjadi: (1) nelayan penangkap ikan (anak buah kapal dan pemilik), (2) petambak/pembudidaya, (3) pengolah hasil laut, dan (4) pedagang hasil laut (Susilowati, 2004 dalam Hendratmoko, 2010). Sementara itu, sumber pendapatan rumah tangga nelayan berasal dari pendapatan melaut dan pendapatan non melaut. Pendapatan non melaut dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: pendapatan buruh perikanan, pendapatan *off fishing* sebagai pengolah atau perdagangan perikanan dan pendapatan non perikanan (Purwanti, 2010).

Pendapatan masyarakat bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang terdapat di lautan. Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka karena pendapatan dari hasil berlayar merupakan sumber pemasukan utama atau bahkan satu-satunya bagi mereka, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka terutama terhadap kemampuan mereka dalam mengelola lingkungan tempat hidup (David, 2014).

2.9 Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2014), dalam proses penyusunan perencanaan strategis terdapat tiga tahap, yaitu: tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan.

1. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan internal. Data eksternal berasal dari lingkungan luar, seperti:

- Analisis pasar
- Analisis kompetitor
- Analisis komunitas
- Analisis pemasok
- Analisis pemerintah

Data internal dapat diperoleh dari dalam lingkungan, seperti:

- Laporan keuangan
- Laporan kegiatan sumber daya manusia
- Laporan kegiatan operasional
- Laporan kegiatan pemasaran

Dalam tahap ini terdapat dua model yang digunakan, yaitu: Matrik Faktor Strategi Eksternal dan Matrik Faktor Strategi Internal.

a. Matrik Faktor Strategi Eksternal

Sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal, terlebih dahulu perlu mengetahui faktor strategi eksternal EFAS (*External Factors Analysis Summary*) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis eksternal tersebut dalam kerangka *Opportunities dan Threats*. Berikut ini adalah cara menentukan faktor strategi eksternal (EFAS):

- Disusun dalam kolom 1 (5 – 10 peluang dan ancaman)

- Diberi bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis.
- Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi yang bersangkutan.
- Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya mulai dari 4,0 sampai dengan 1,0.
- Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- Jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk memperoleh total skor pembobotan.

Tabel 1. Contoh dari tabel EFAS

Faktor – Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Peluang			
-			
-			
-			
Ancaman			
-			
-			
-			
Total			

Sumber: Rangkuti, 2014

b. Matrik Faktor Strategi Internal

Setelah faktor-faktor strategi internal diidentifikasi, suatu tabel IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) disusun untuk merumuskan faktor-

faktor strategis internal tersebut dalam kerangka *Strength* dan *Weakness*. Tahapnya adalah:

- Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam kolom 1.
- Beri bobot masing-masing faktor tersebut dalam kolom 2 dengan skala kualitatif dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting).
- Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi yang bersangkutan.
- Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4.
- Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih, dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan.

Tabel 2. Contoh dari Tabel IFAS

Faktor – Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan			
-			
-			
-			
Kelemahan			
-			
-			
-			
Total			

Sumber: Rangkuti, 2014

2. Tahap Analisis

Setelah mengumpulkan semua informasi, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Pada penelitian ini, model yang digunakan adalah matrik SWOT.

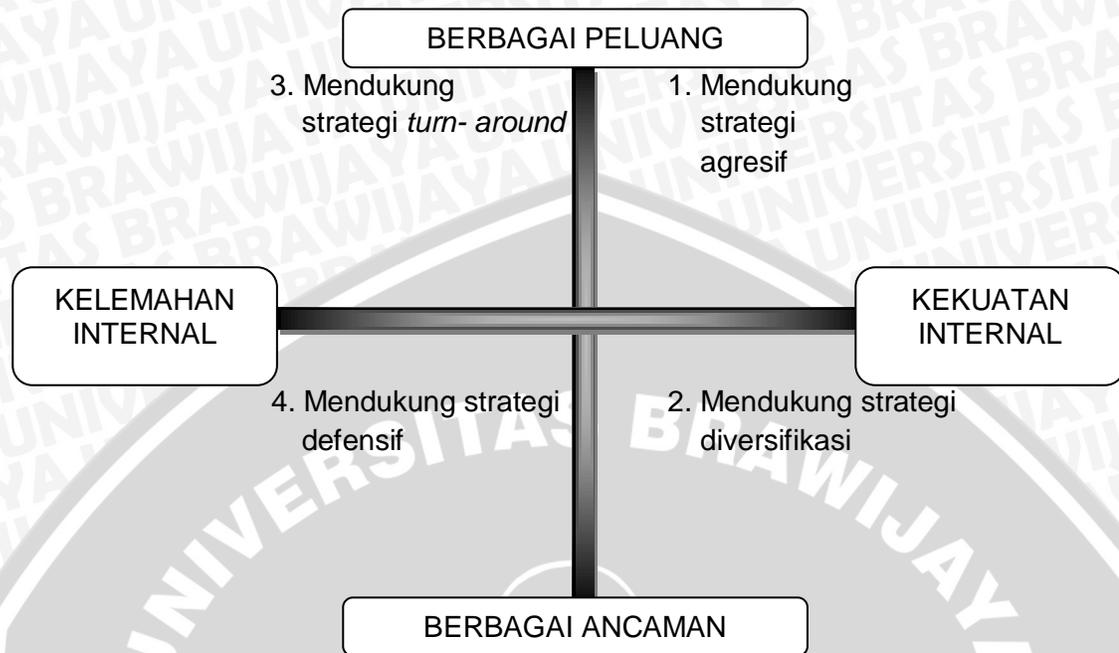
Matrik SWOT ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis.

Tabel 3. Matrik SWOT

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
EFAS	<ul style="list-style-type: none"> Tentukan 5 – 10 faktor – faktor kekuatan internal 	<ul style="list-style-type: none"> Tentukan 5 – 10 faktor – faktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan unuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
TREATHS (T)	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti, 2014

Menurut Rangkuti (2014), analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).



Gambar 1. Diagram Matrik Grand Strategi

Sumber: Rangkuti, 2014

Kuadran 1: Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Daerah tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, daerah ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).

Kuadran 3: Suatu daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di pihak lain menghadapi beberapa kelemahan internal. Fokus strategi pada daerah ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal daerah sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

Kuadran 4: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, daerah tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

2.10 Penelitian Terdahulu

Desa Kedungrejo merupakan minapolis kawasan minapolitan Kabupaten Banyuwangi yang memiliki fungsi sebagai *fishery town*. Menurut hasil penelitian Utami (2013) dengan judul “Pembangunan Minapolis dan *Hinterland* Kawasan Minapolitan”, fungsi wilayah yang harus ada sebagai *fishery town* diantaranya harus terdapat: (1) industri pengalengan ikan, (2) industri tepung ikan, (3) industri minyak ikan, (4) *cold storage*, (5) tempat pelelangan ikan (TPI), (6) pasar ikan; dan (7) pelabuhan perikanan pantai (PPP).

Pada penelitian Wiadnya (2011) yang mengkaji “Konsep Perencanaan Minapolitan dalam Pengembangan Wilayah”, konsep minapolitan pada dasarnya hampir sama agropolitan, perbedaan dasar terletak pada sektor penggerak ekonomi dari perikanan. Minapolitan sebaiknya dirancang untuk menumbuhkan kota-kota kecil mandiri dan mengurangi penumpukan penduduk di kota-kota besar. Minapolitan tidak selalu harus mulai dari awal. Minapolitan merupakan proses yang dinamis dan siklik dengan karakteristik dasar pendekatan multi-sektor secara terpadu. Suatu kawasan minapolitan sebaiknya mempunyai karakteristik sebagai berikut; 1). Sentra kota mempunyai cadangan sumber daya ikan atau kapasitas produksi ikan yang mampu menjadi penggerak ekonomi seluruh kawasan minapolitan (sentra dan wilayah sekitarnya); 2). Kawasan minapolitan harus bisa tumbuh dan berkembang sebagai kawasan mandiri; 3). Pengembangan kawasan minapolitan harus dilakukan secara terpadu dan efisien, melibatkan instansi dari tingkat pusat dan daerah maupun instansi lintas sektor.

Pada penelitian Hermawan (2006) yang berjudul “Prospektif Pengembangan Kawasan Pesisir Sendang Biru untuk Indutri Perikanan Terpadu”, salah satu kawasan pesisir yang dijadikan prioritas adalah kawasan Pesisir Sendang Biru, karena pada saat ini memiliki Pusat Pendaratan Ikan Pondokdadap dan merupakan pusat kegiatan perikanan tangkap terbesar di Kabupaten Malang. Kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Malang menjadikan kawasan pesisir Sendang Biru diarahkan untuk pengembangan kawasan perikanan terpadu yang populer dengan program *Fishery town*. Apabila kebijakan tersebut bisa direalisasikan dan sinergis dengan kebijakan provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, maka Pusat Pendaratan Ikan Pondokdadap Sendang Biru, niscaya akan menjadi pelabuhan ikan terbesar setelah Cilacap di Selatan Jawa, karena berdasarkan pertimbangan geografis, topografis dan oceanografis pantai Sendang Biru merupakan pantai terbaik di Selatan Jawa setelah Cilacap, karena: (1) berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan IX; yang menjadi alur migrasi ikan pelagis besar, terutama ikan tuna; (2) memiliki barier P.Sempu: panjang selat 4 km, lebar 400-1500 m, kedalaman rata-rata 20 m, sehingga perairan di wilayah tersebut relatif tenang; (3) mudah terjangkau oleh transportasi; dan (4) secara topografis kedalaman sesuai untuk berlabuhnya armada penangkapan domestik maupun luar daerah.

Menurut KKP (2013) yang berjudul “Pengembangan Kawasan Minapolitan” kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap yang ideal mencakup beberapa lokasi dimana terdapat zona inti (TPI terbesar) dengan TPI lain (pendukung). Disamping itu berdekatan dengan zona inti terdapat pasar ikan dan Industri. Dan tidak jauh dari lokasi zona inti terdapat lokasi perumahan nelayan, zona pariwisata dan juga lokasi budidaya. Untuk menjamin keberlanjutan usaha budidaya dan

penangkapan juga diperlukan kawasan konservasi perairan, dimana kawasan ini merupakan tempat ikan untuk bereproduksi dan juga menjaga lingkungan perairan agar kualitas lingkungan perairan tetap terjaga. Beberapa indikator capaian minapolitan berbasis perikanan tangkap di lokasi percontohan tahun 2013 di Ternate, Bitung, Ambon, Sukabumi, Pekalongan, Lamongan, Bangka dan Pacitan dilihat dari volume produksi, nilai produksi, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan nelayan mengalami peningkatan. Kawasan minapolitan jika dikelola dengan sungguh-sungguh bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu harus sinergis dalam dukungan antara pemerintah (Pusat dan Daerah, provinsi dan kabupaten) serta pemangku kepentingan menjadi kunci utama pengembangan minapolitan. Dukungan daerah yang konsisten sebagai ujung tombak pembangunan minapolitan agar mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Sunoto (2011) dalam judul artikel "Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan Indonesia", minapolitan sendiri berasal dari kata mina berarti ikan dan politan berarti polis atau kota, sehingga secara bebas dapat diartikan sebagai kota perikanan. Pengembangan konsep dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota. Dari beberapa paparan diatas, dapat dikatakan bahwa program *fishery town* merupakan bagian dari program minapolitan. Program *fishery town* difokuskan kepada kota kecil yang mempunyai potensi perikanan yang tinggi. Minapolitan terdiri dari kota perikanan dan desa-desa sentra produksi perikanan yang ada disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada. Sentra

produksi dan perdagangan perikanan tangkap yang dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan adalah pelabuhan perikanan. Pada program minapolitan berbasis perikanan tangkap, sumberdaya buatan adalah pelabuhan perikanan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi Tempat Pendaratan Ikan (TPI), akses jalan raya, ketersediaan listrik, dermaga, pabrik es, air bersih dan kapal penangkapan.

Tabel 4. Analisis dan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Analisis dan Hasil Penelitian
1.	Pembangunan Minapolis dan <i>Hinterland</i> Kawasan Minapolitan	Ratna Wahyu Utami, <i>et al.</i> , (2013)	Fungsi wilayah yang harus ada sebagai <i>fishery town</i> diantaranya harus terdapat: (1) industri pengalengan ikan, (2) industri tepung ikan, (3) industri minyak ikan, (4) <i>cold storage</i> , (5) tempat pelelangan ikan (TPI), (6) pasar ikan; dan (7) pelabuhan perikanan pantai (PPP)
2.	Konsep Perencanaan Minapolitan dalam Pengembangan Wilayah	Dewa Gede Raka Wiadnya, (2011)	Suatu kawasan minapolitan sebaiknya mempunyai karakteristik sebagai berikut; 1). Sentra kota mempunyai cadangan sumber daya ikan atau kapasitas produksi ikan yang mampu menjadi penggerak ekonomi seluruh kawasan minapolitan 2). Kawasan minapolitan harus bisa tumbuh dan berkembang sebagai kawasan mandiri; 3). Pengembangan kawasan minapolitan harus dilakukan secara terpadu dan efisien, melibatkan instansi dari tingkat pusat dan daerah maupun instansi lintas sektor.
3.	Prospektif Pengembangan Kawasan Pesisir Sendang Biru untuk Industri Perikanan Terpadu	David Hermawan, (2006)	Kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Malang menjadikan kawasan pesisir Sendang Biru diarahkan untuk pengembangan kawasan perikanan terpadu yang populer dengan program <i>Fishery town</i> . Berdasarkan pertimbangan geografis,

			<p>topografis dan oseanografis pantai Sendang Biru merupakan pantai terbaik di Selatan Jawa setelah Cilacap, karena: (1) berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan IX; yang menjadi alur migrasi ikan pelagis besar, terutama ikan tuna; (2) memiliki barier Pulau Sempu: panjang selat 4 km, lebar 400-1500 m, kedalaman rata-rata 20 m; (3) mudah terjangkau oleh transportasi; dan (4) secara topografis kedalaman sesuai untuk berlabuhnya armada penangkapan domestik maupun luar daerah.</p>
4.	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2013)	<p>Beberapa indikator capaian minapolitan berbasis perikanan tangkap di lokasi percontohan tahun 2013 di Ternate, Bitung, Ambon, Sukabumi, Pekalongan, Lamongan, Bangka dan Pacitan dilihat dari volume produksi, nilai produksi, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan nelayan mengalami peningkatan</p>
5.	Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan Indonesia	Sunoto, (2011)	<p>Pengembangan konsep minapolitan dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota. Minapolitan terdiri dari kota perikanan dan desa-desa sentra produksi perikanan yang ada disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada.</p>

Dalam perencanaan pembangunan ke depan, Pelabuhan Perikanan Mayangan dapat didesain sebagai kawasan industri perikanan terpadu yang letaknya di jalur pantura, karena letaknya sangat strategis, mudah dijangkau dan memiliki akses distribusi yang cukup luas ke berbagai wilayah dan kota-kota besar di seluruh Pulau Jawa. Perencanaan fasilitas pelabuhan perikanan memerlukan perencanaan yang mampu mengakomodasi perubahan kondisi (pertumbuhan) di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan pelabuhan sangat berkaitan dengan tingkat produktivitas, jumlah fasilitas yang diperlukan, serta tingkat pelayanan jasa yang disediakan. Posisi Pelabuhan Perikanan Mayangan sebenarnya cukup strategis baik ditinjau dari aspek sumberdaya perikanan, sumberdaya manusia, kegiatan usaha perikanan (agrobisnis dan agroindustri perikanan).

Secara lebih luas, Pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan yang dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut sehingga melalui program *fishery town* (minapolitan) diharapkan dapat mendukung terjadinya sistem kota-kota yang terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan keterkaitan antar kota dalam bentuk pergerakan barang, modal, dan manusia. Melalui dukungan sistem infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan antar kawasan minapolitan dan pasar dapat dilaksanakan. Dengan demikian, perkembangan kota yang serasi, seimbang, dan terintegrasi dapat terwujud.

2.11 Kerangka Penelitian

Sumberdaya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Pada pembangunan program *fishery town* (minapolitan) berbasis perikanan terpadu pada pelabuhan

perikanan sumber daya yang dimanfaatkan dan dikelola antara lain adalah sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia. Sumberdaya alam yaitu pemanfaatan sumberdaya ikan yang bersifat *open access* artinya semua orang dapat melakukan kegiatan penangkapan di suatu wilayah perairan tanpa ada pembatasan. Didukung dengan sumberdaya buatan berupa sarana dan prasarana, alat tangkap, armada perikanan, dan lain-lain serta sumberdaya manusia yaitu nelayan, pedagang, pelaku usaha perikanan ataupun non perikanan dan pihak-pihak terkait merupakan aspek penting yang menjadi penentu suatu keberhasilan aktivitas kegiatan ekonomi.

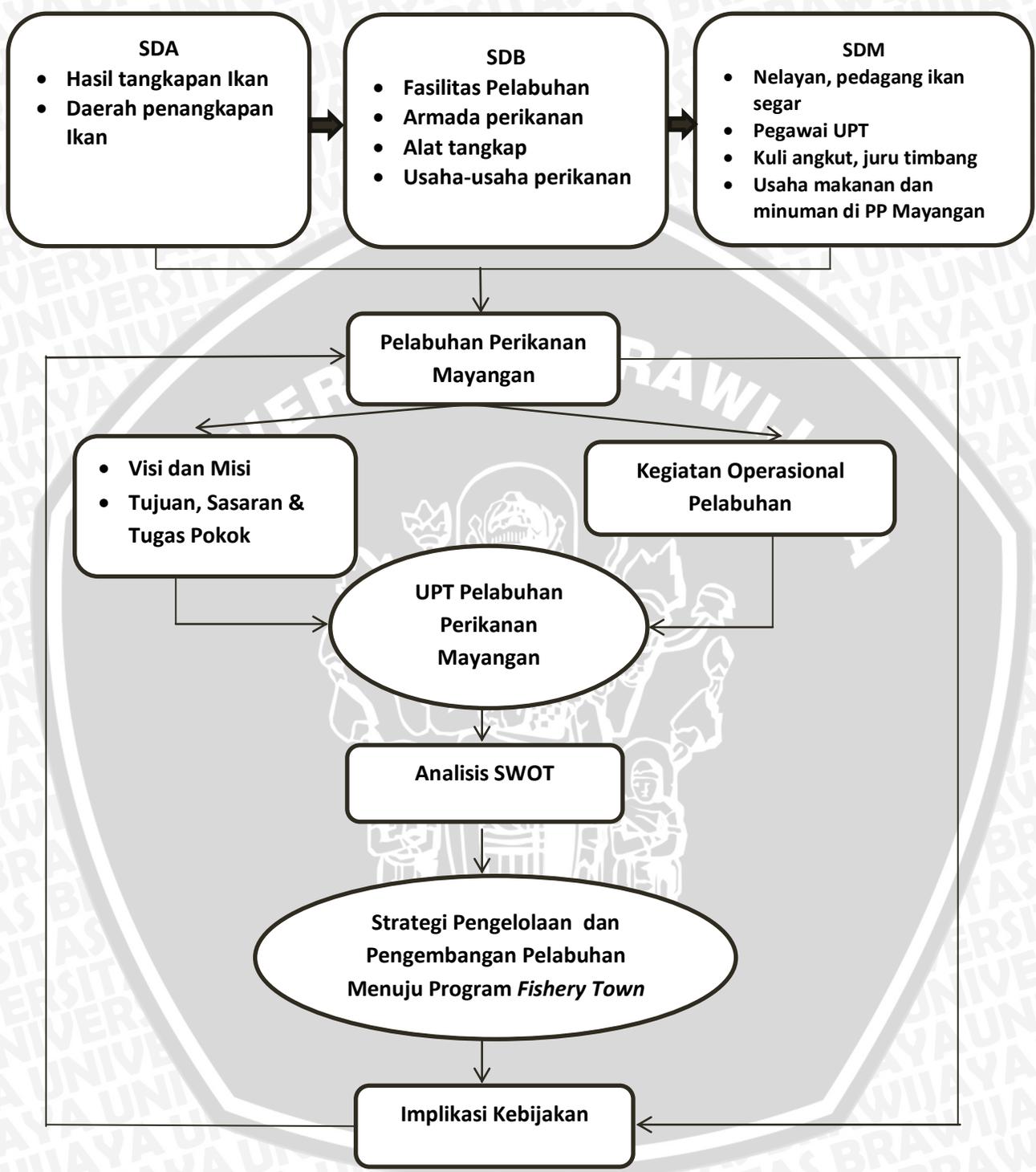
Ketersediaan pelabuhan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap sangat vital untuk mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan dan usaha pendukungnya. Pelabuhan perikanan sebagai infrastruktur pendukung usaha mempunyai fungsi untuk melayani operasional kapal perikanan, pengumpulan data produksi, pelayanan pembinaan mutu, tempat pengembangan penyuluhan dan pembinaan masyarakat nelayan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran, tempat pengawasan dan pengendalian SDI, proses Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan lainnya.

Kemajuan perikanan tangkap dapat dilihat dari sejauh mana pelabuhan perikanan berkembang. Pengembangan pelabuhan perikanan ke depan diarahkan untuk meningkatkan operasional (pengelolaan dan pelayanan) pelabuhan perikanan, mengembangkan kelembagaan pengelola, dan meningkatkan fasilitas dasar pelabuhan perikanan. Upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 08 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yaitu penyedia fasilitas operasional, regulator (pembuat kebijakan) dan evaluator yang mengadakan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pelabuhan perikanan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Mayangan. UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan bertanggung jawab terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. Adanya kelembagaan yang menaungi pelabuhan perikanan mayangan dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan pelabuhan sesuai rencana strategis (renstra).

Pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan yang dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut sehingga melalui program *fishery town* (minapolitan) dapat menjadi kawasan bisnis sentra produksi perikanan tangkap. Analisis SWOT dipakai untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Mengacu pada hal tersebut, maka diperlukan pengelolaan pelabuhan meliputi kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan pelayanan untuk pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan dalam rangka menentukan strategi pengelolaan dan pengembangan pelabuhan sebagai upaya peningkatan sektor kinerja UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan sehingga bermanfaat bagi perencanaan dan penyelenggaraan manajemen pembangunan pelabuhan perikanan serta dalam rangka menuju program *fishery town* di Kota Probolinggo.



Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian